



Jurnal READ (Research of Empowerment and Development)

<http://jos.unsoed.ac.id/index.php/read>

e-ISSN: 2745-4746

Vol. 1 No. 2 Oktober 2020: 89-99

DOI: <https://doi.org/10.20884/1.read.2020.1.2.3521>

Dinamika Pengelolaan Sampah: Studi Kasus Sistem Hanggar di Kabupaten Banyumas

Yuni Tristanti¹, Eko Hendarto², Edy Suyanto³

¹Magister Ilmu Lingkungan Pascasarjana, Universitas Jenderal Soedirman

²Jurusan Tanaman Pangan, Fakultas Peternakan, Universitas Jenderal Soedirman

³Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman

E-mail: yunitristanti.yt@gmail.com

Abstract

The waste problem has become an environmental issue in all parts of the world, including the State of Indonesia, especially Banyumas Regency. Waste management in Banyumas Regency has changed, a new paradigm. Starting from the difficulty of land for final processing sites (TPA) to dispose of waste, Banyumas Regency has changed the way it manages its waste. Waste management, which was originally collected-transport-dispose of, was changed in accordance with statutory regulations, namely having to sort the waste from its source. Waste sorting must be carried out in addition to aiming to reduce dependence on large landfills which are now difficult to provide and to achieve the target of the Banyumas District Regional Strategy Policy (Jakstrada), which is to set a target of reducing waste by 30% and handling waste by 70% by 2025. Target A 30% reduction in waste can be achieved by sorting waste by establishing several hangars as centers for sorting community waste. Banyumas Regency has established 5 (five) hangars in 5 (five) areas, namely the Ajibarang hangar, the Sumbang hangar, the Wangon hangar, the Kedungrandu hangar and the Sumpiuh hangar. Waste sorting using the hangar system was chosen because the community considered direct waste sorting to fail, reflecting on the various waste sorting programs that have existed in Indonesia. The hangar establishment in Banyumas Regency aims to provide an example of direct sorting of waste to the community. Activities in the hangar are sorting waste from the community who are its customers with the aim of educating the public about sorting waste so that waste problems can be resolved from the source. Hangar activities carry out reuse, reduce and recycle waste, so that the waste disposed of in the TPA is really residual waste that cannot be used anymore. Based on the research, the hangar actually does sorting of waste but it is not as expected by the Banyumas Regency Government, namely, the residual waste disposed of to the TPA from all hangar activities is still very high, on average above 70% of the total waste that enters the hangar, and The target of reducing waste by 30% by sorting the new waste was achieved at 18.33%.

Keywords: waste, management, dynamics, hangars, environmental

Abstrak

Permasalahan sampah menjadi isu lingkungan di semua belahan dunia, termasuk Negara Indonesia khususnya Kabupaten Banyumas. Pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas mengalami perubahan, paradigma baru. Berawal dari kesulitan lahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) untuk membuang sampah maka Kabupaten Banyumas merubah cara dalam mengelola sampahnya. Pengelolaan sampah yang semula kumpul-angkut-buang dirubah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yaitu harus melakukan pemilahan sampah dari sumbernya. Pemilahan sampah harus dilaksanakan selain bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap lahan TPA yang luas yang sekarang sulit disediakan serta untuk mencapai target Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada) Kabupaten Banyumas, yaitu menetapkan target pengurangan sampah sebesar 30 % dan penanganan sampah sebesar 70 % sampai tahun 2025. Target pengurangan sampah sebesar 30 % berusaha dicapai dengan melakukan pemilahan sampah dengan mendirikan beberapa hangar sebagai pusat pemilahan sampah masyarakat. Kabupaten Banyumas mendirikan 5 (lima) hangar di 5 (lima) wilayah, yaitu hangar Ajibarang, hangar Sumbang, hangar Wangon, hangar Kedungrandu dan hangar Sumpiuh. Pemilahan sampah dengan system hangar dipilih karena pemilahan sampah langsung oleh masyarakat dinilai banyak mengalami kegagalan, berkaca dari berbagai program pemilahan sampah yang telah ada di Indonesia. Pendirian hangar di Kabupaten Banyumas bertujuan memberikan contoh pemilahan sampah secara langsung kepada masyarakat.

Kegiatan di hanggar yaitu melakukan pemilahan sampah yang berasal dari masyarakat yang menjadi pelanggannya dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat dalam hal pemilahan sampah sehingga permasalahan sampah dapat selesai dari sumbernya. Kegiatan hanggar melakukan reuse, reduce dan recycle sampah, sehingga sampah yang dibuang ke TPA benar-benar sampah residu yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi. Berdasarkan penelitian, hanggar benar-benar melakukan pemilahan sampah akan tetapi belum sesuai harapan yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas yaitu, sampah residu yang dibuang ke TPA dari semua kegiatan hanggar masih sangat tinggi rata-rata diatas 70 % dari total sampah yang masuk hanggar, dan target pengurangan sampah sebesar 30 % dengan cara pemilahan sampah baru tercapai sebesar 18,33 %

Kata kunci: sampah, pengelolaan, dinamika, hanggar, lingkungan

Pendahuluan

Pemerintah Kabupaten Banyumas, telah berusaha mengolah sampah sesuai dengan kemampuannya, mengangkut sampah dari sumbernya lalu dibuang ke TPA Kaliori, namun karena daya tampung di TPA Kaliori yang terbatas dan sudah *over load* serta kondisi pengelolaan kolam air limbah sampah (kolam lindi) sejak bulan Maret 2017 tidak berfungsi normal karena terkena longsoran tanah dan timbunan sampah akibat hujan yang terus menerus sejak awal bulan Januari 2017 – Maret 2017, maka penumpukan sampah di TPA Kaliori berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Puncak dari akibat dampak negatif, warga Desa Kaliori pada tanggal 2 April 2018 melakukan pemblokiran dan demo menolak sampah masuk ke TPA Kaliori (DLH Kabupaten Banyumas, 2018).

Pengelolaan sampah sudah saatnya diubah memakai pendekatan yang berwawasan lingkungan, melalui penerapan 3R (*reduce, reuse, recycle*). Konsep utama pengelolaan sampah pada TPS 3R adalah untuk mengurangi kuantitas dan/atau memperbaiki karakteristik sampah, yang akan diolah lebih lanjut di TPA sampah. TPS 3R diharapkan berperan dalam menjamin kebutuhan lahan yang semakin kritis untuk penyediaan TPA sampah di perkotaan. Sampah di satu sisi dianggap sebagai permasalahan, namun dengan pengelolaan secara 3R yang tepat merubah sampah menjadi sumber daya yang memberikan nilai ekonomi. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas tahun 2018, jumlah timbulan sampah sekitar 4.226 m³/hari, sementara yang terangkut ke TPA sebanyak 491,44 m³/hari. Terdapat

sampah yang tidak terangkut ke TPA sebesar 3.734,56 m³/hari atau sebesar 88%. Akibat sampah yang tidak terangkut, menimbulkan perilaku masyarakat yang membuang sampah ke sungai, tepi jalan, tepi jembatan atau membakarnya.

Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga, telah diikuti Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Bupati Banyumas No 45 Tahun 2018 tentang Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada), menetapkan target pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sampai 70% sampai tahun 2025. Upaya pemenuhan target diarahkan untuk mengurangi sampah melalui aktivitas 3R, serta melakukan penanganan sampah secara baik. Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2018 telah membangun TPS 3R yang disebut dengan pengelolaan sampah sistem hanggar. Pengelolaan sampah sistem hanggar merupakan inovasi pengelolaan sampah dari Pemerintah Kabupaten Banyumas, yang baru pertama kali ada di Indonesia. Hanggar di bangun diatas tanah seluas minimal 1.200 m² melalui APBD di lima lokasi yaitu : Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang, Desa Karangcegak Kecamatan Sumbang, Desa Banteran Kecamatan Wangon, Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja dan Kelurahan Kradenan Kecamatan Sumpiuh. Pengelolaan sampah sistem hanggar dinilai bagus oleh pemerintah pusat dengan ditandai

pemberian bantuan peralatan pengelolaan sampah dan bantuan pendirian Pusat Daur Ulang Sampah (PDU) yang merupakan replikasi hanggar skala kecil. Berdasarkan hal tersebut tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk menganalisa pengelolaan sampah dengan sistem hanggar di Kabupaten Banyumas.
2. Untuk menganalisa upaya pengurangan sampah yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mencapai target Jakstrada.

Metode Penelitian

Penelitian tentang “Dinamika Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas (Studi Kasus Sistem Hanggar)”, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif evaluatif. Pendekatan kualitatif mempunyai arti bahwa dalam melakukan penelitian, peneliti berpedoman dengan cara kerja penilaian subjektif non statistik / non matematis. Artinya bahwa , ukuran nilai yang digunakan dalam penelitian bukanlah angka-angka atau skor, melainkan kategorisasi atau kualitasnya. Pendekatan tersebut sejalan dengan karakteristik metode penelitian yang dipilih yaitu deskriptif evaluatif.

Metode deskriptif adalah cara kerja penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan, melukiskan, atau memaparkan keadaan suatu objek (realita atau fenomena) secara apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penelitian itu dilakukan (Ibrahim, 2015).

Metode evaluasi menurut (Sugiyono, 2018), adalah merupakan evaluasi program, sebagai metode ilmiah yang digunakan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi suatu program, kebijakan, proyek dan aktivitas tertentu baik yang telah lalu, yang sedang terjadi, dan usulan program yang akan datang.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di 5 hanggar pengelolaan sampah yang masing-masing berada di TPS3R di Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang, TPS3R di Desa

Krangcegak Kecamatan Sumbang, TPS3R di Desa Banteran Kecamatan Wangon, TPS3R di Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja dan TPS3R di Kelurahan Kradenan Kecamatan Sumpiuh.

Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Subyek penelitian adalah hanggar di lima tempat, yaitu : TPS3R di Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang (Hanggar Ajibarang), TPS3R di Desa Krangcegak Kecamatan Sumbang (Hanggar Sumbang), TPS3R di Desa Banteran Kecamatan Wangon (Hanggar Wangon), TPS3R di Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja (Hanggar Kedungrandu) dan TPS3R di Kelurahan Kradenan Kecamatan Sumpiuh (Hanggar Sumpiuh). Sasaran utama penelitian adalah ketua hanggar.

Sumber Data

Sasaran utama data adalah ketua di masing-masing hanggar di lima tempat serta pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Kriteria sasaran utama sebagai berikut :

1. Ketua Hanggar
 - a. Menjabat sebagai ketua hanggar setempat yang mengelola sampah.
 - b. Ikut membidani berdirinya hanggar.
 - c. Masih aktif sebagai pengurus.
 - d. Menjabat sebagai ketua sekurang-kurangnya satu tahun
2. Pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Alasan memilih pegawai DLH karena kegiatan persampahan di Kabupaten Banyumas di bawah wewenang DLH termasuk kegiatan hanggar.
 - a. Status pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas bidang persampahan.
 - b. Ikut aktif dalam membidani berdirinya hanggar.
 - c. Mempunyai tupoksi yang berhubungan dengan hanggar.
 - d. Masa kerja di bidang Kebersihan sekurang-kurangnya dua tahun.

Kriteria sasaran pendukung :

1. Pegawai (ASN/non ASN) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas bidang Kebersihan.
2. Ikut aktif dalam mengurus persampahan.
3. Mempunyai tupoksi yang berhubungan dengan sampah/hanggar.
4. Masa kerja di bidang Kebersihan sekurang-kurangnya dua tahun.

Sasaran validitas mempunyai kriteria sebagai berikut : menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dan/atau Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.

Sumber data tambahan adalah segala bentuk dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun foto.

Data

Data dalam penelitian ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah segala informasi, fakta dan realitas yang terkait atau relevan dengan penelitian, kaitan/relevansinya sangat jelas, bahkan sangat langsung. Data sekunder adalah segala informasi, fakta dan realitas yang juga terkait atau relevan dengan penelitian, namun tidak secara langsung, atau tidak begitu jelas relevansinya. Oleh karena itu, data dalam penelitian adalah segala bentuk fakta, data dan informasi yang digali dari subjek penelitian yang berkenaan dengan pengelolaan sampah dengan sistem hanggar di Kabupaten Banyumas.

Peneliti tidak menggunakan cara sampling/keterwakilan dalam penelitian karena hanya ada 5 hanggar yang beroperasi dan kesemuanya akan diteliti. Peneliti melakukannya dengan cara sensus. Cara sensus berarti informasi dikumpulkan dari seluruh populasi (Singarimbun & Efendi, 1995). Teknik penentuan sumber data menggunakan *non probability sampling*, yaitu *purposive sampling*. *Purposive* menjadi acuan mencari sumber data berdasarkan ketercapaian tujuan penggalan data yang diharapkan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data baik data primer maupun data sekunder dalam penelitian dengan cara pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi untuk mengetahui kegiatan hanggar dilakukan dengan cara datang dan melakukan pengamatan langsung kegiatan ke masing-masing hanggar. Observasi untuk mengetahui besarnya pengurangan sampah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan cara pengamatan kegiatan hanggar dan data dari laporan pemilahan sampah.
2. Wawancara

Pedoman wawancara yang dipergunakan dalam penelitian, yaitu :

 - a. Pedoman wawancara dalam bentuk daftar pertanyaan-pertanyaan umum yang ingin diberikan kepada informan untuk dijawab. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sifatnya garis besar saja, karenanya pertanyaan tersebut pasti akan mengalami perkembangan atau penambahan dalam proses Tanya jawab wawancara penelitian yang dilakukan.
 - b. Pedoman wawancara dalam bentuk penjabaran fokus utama penelitian kepada aspek-aspek fokus yang hendak digali datanya, dan ditanyakan kepada informan dalam penelitian.
3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan-catatan peristiwa yang telah lalu, berbentuk tulisan, Gambar atau karya monumental seseorang (Sugiono, 2008). Pengambilan data untuk penelitian diambil dari laporan hanggar ke dinas terkait, foto maupun dokumen misal paparan oleh Dinas yang mengurus sampah, notulen rapat, nota dinas dan lain sebagainya yang terkait.

Teknik Pengujian dan Keabsahan Data

Keabsahan data (*trustworthiness of data*) adalah bagian yang penting (*elementary*) dalam penelitian. Kebenaran (keabsahan) data sebuah penelitian dilihat dari derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Berdasarkan kriteria derajat kepercayaan (*credibility*), pemeriksaan keabsahan data penelitian dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dimaknai sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian dengan cara membanding-bandingkan antara sumber, teori, maupun metode/teknik penelitian. Teknik triangulasi memungkinkan peneliti untuk *me-recheck* temuan data dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode/teknik, atau teori. Teknik triangulasi setidaknya ada tiga jalan yang dilakukan oleh peneliti, yaitu :

- a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan.
- b. Mengeceknnya dengan berbagai sumber data.
- c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan keterpercayaan data dapat dilakukan.

Hasil dan Pembahasan

Tindak lanjut dari Peraturan Bupati Banyumas No 45 Tahun 2018 tentang Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada), menetapkan target pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sampai 70% sampai tahun 2025. Upaya pemenuhan target diarahkan untuk mengurangi sampah melalui aktivitas 3R. Pemerintah Kabupaten Banyumas lewat DLH mencari cara pengelolaan sampah yang dapat menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Cara yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mencapai tujuan yaitu merubah cara pengelolaan sampah sebelumnya menjadi pengelolaan sampah yang menitikberatkan pada penanganan sampah dari sumbernya maka dipilihlah upaya pengelolaan sampah Sistem Hanggar. Program pengelolaan sampah sistem hanggar terus disosialisasikan kepada masyarakat

tanpa henti. Pengelolaan Sampah Sistem Hanggar merupakan inovasi upaya penanganan sampah di Kabupaten Banyumas.

Pengelolaan sampah sistem hanggar adalah sebuah cara pengelolaan sampah yang dipilih selama masa transisi pengelolaan sampah. Transisi dari pengelolaan sampah paradigma lama menjadi pengelolaan sampah paradigma baru. Pengelolaan sampah paradigma lama yaitu pengelolaan sampah hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banyumas sepenuhnya. Pengelolaan sampah paradigma baru yaitu pengelolaan sampah tidak lagi menjadi urusan pemerintah saja akan tetapi merupakan urusan seluruh masyarakat penghasil sampah.

Paradigma baru pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas, nantinya sampah harus dikelola di sumber timbulan sampah. Sampah tidak boleh keluar dari wilayah Rukun Tetanga (RT) atau jika terpaksa keluar dari RT maka tidak boleh keluar dari wilayah Rukun Warga (RW). Seandainya sampah terpaksa keluar dari RW, maka tidak boleh keluar dari desa atau kelurahan. Seandainya terpaksa keluar dari wilayah desa atau kelurahan, maka sampah tidak boleh keluar dari wilayah Kecamatan. Batas terluar peredaran sampah adalah wilayah kecamatan. Pejabat camat bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah di wilayahnya (Laporan Periodik Sampah Harian Kabupaten Banyumas Tahun 2018, 2018).

Pengelolaan sampah paradigm baru dicapai dengan membuat komitmen. Komitmen dibuat antara lain oleh Bupati Banyumas, dan semua pejabat serta pimpinan lembaga, partai politik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, semua camat, kepala desa dan kepala kelurahan, semua lembaga baik pemerintah maupun swasta, baik formal maupun non formal. Komitmen yang ada adalah membuat janji bersama untuk mengadakan aksi pengelolaan sampah. Setelah komitmen terwujud dilanjutkan dengan partisipasi semua pihak dan semua elemen masyarakat.

Cara pengelolaan sampah yang seharusnya dilakukan oleh penghasil sampah dapat dilihat di dalam hanggar. Hanggar mempunyai karyawan yang bertugas untuk melakukan pengelolaan sampah mulai dari Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir. Penghasil sampah yang tidak mampu mengelola sampahnya sampai selesai dapat melakukan kerjasama dengan salah satu hanggar yang terdekat dengan sumber sampah. Jadi pengelolaan sampah sistem hanggar adalah upaya Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mengedukasi warganya mengenai cara pengelolaan sampah yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nantinya replika hanggar akan dibangun sampai tingkat desa sebagai solusi permasalahan sampah yang ada.

Pengelolaan sampah sistem hanggar mulai operasional di awal tahun 2019 yang merupakan sistem pengelolaan sampah *top-down*, dari pemangku kepentingan kepada masyarakat yang nantinya akan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat lewat KSM. Program pengelolaan sampah sistem hanggar merupakan program baru, karena kebanyakan program bersifat *bottom-up* yaitu pemerintah memberi perhatian dan memberikan fasilitas kepada KSM yang melakukan pengelolaan sampah. Banyak perhatian dan bantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun dari Kementerian Pekerjaan Umum terkait keberlangsungan program pengelolaan sampah sistem hanggar.

Penelitian dilakukan oleh peneliti di 5 lokasi hanggar di wilayah Kabupaten Banyumas. Penelitian dimulai sejak awal bulan Pebruari 2020 sampai akhir bulan April 2020, walau sebelumnya peneliti sudah melakukan penelitian pendahuluan guna penulisan proposal penelitian dan untuk menambah wawasan mengenai obyek penelitian.

Pada dasarnya penelitian berjalan dengan lancar tidak mengalami kendala, karena peneliti sendiri sehari-hari bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Banyumas. Proses untuk mendapatkan data tidak bisa serta merta diperoleh semua dalam hitungan hari atau minggu akan tetapi sedikit demi sedikit peneliti peroleh di lokasi hanggar maupun di Dinas Lingkungan Hidup. Untuk memperoleh data dari hanggar jelas peneliti melakukan observasi lapangan, merekam semua yang ada di hanggar baik benda maupun aktivitas pekerja yang terlibat disana, sedangkan wawancara dengan pengelola hanggar tidak bisa serta merta selesai dalam satu atau dua kali pertemuan melainkan berkali-kali pertemuan. Pengelola hanggar ketika berada di hanggar sangat disibukkan dengan kegiatan hanggar yang dikelolanya, sehingga peneliti harus cukup sabar dan tau diri kapan waktu yang tepat.

Penelitian berupa wawancara dengan ketua hanggar dilakukan juga di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas ketika para ketua hanggar menghadiri undangan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Kegiatan wawancara pada situasi seperti ini lebih cair dan mengalir, info lebih banyak digali dan didapatkan dan langsung dapat ditanyakan kebenaran ataupun permasalahannya kepada pegawai DLH yang menangani. Ketua hanggar lebih nyaman bercerita karena tidak dikejar-kejar pekerjaan yang terlihat di depan mata seperti halnya kalau mereka berada di hanggar. Undangan rapat koordinasi atau pembinaan antara ketua hanggar, pihak dinas maupun fasilitator lumayan sering dilakukan, sehingga peneliti mendapatkan kesempatan cukup besar untuk memperoleh data secara mudah.

Penulis mengumpulkan data dari pegawai di instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dengan cara aktif melakukan wawancara langsung maupun secara pasif dengan membaca laporan, notulen maupun nota dinas. Wawancara dilakukan berulang kali seperti halnya dengan ketua hanggar, berlangsung ketika ada jeda pekerjaan, atau waktu yang senggang. Data yang diperoleh langsung dapat ditanyakan kebenarannya dengan pegawai lain yang terlibat mengenai urusan

hanggar. Misal data dari pengawas lapangan langsung dicek kebenarannya dengan pegawai yang memproses pengadaan, pegawai yang melakukan pembinaan atau dengan pegawai yang ditugaskan menerima laporan evaluasi hanggar, sehingga data yang diperoleh lebih valid.

Kabupaten Banyumas dalam melakukan pengelolaan sampah mengharapkan sampah dapat tertangani secara benar dan tuntas dengan menggunakan sistem hanggar. Damanhuri & Padmi (2019) menyatakan bahwa diperlukan kemauan bersama agar jumlah sampah yang akan diangkut dan akan diuruk atau ditimbun di TPA dapat berkurang khususnya melalui pengelolaan sampah yang berbasiskan pada reduksi dan daur ulang, atau proses lain seperti pengomposan dan sebagainya. Dalam jangka panjang keberadaan TPA sebagai salah satu sarana, perlu dipandang sebagai sebuah komponen dalam strategi mendasar pengelolaan sampah yang berbasiskan pada upaya mereduksi dan mendaur ulang. Bila tidak, persoalan kebutuhan lahan TPA yang besar, dan munculnya permasalahan lingkungan dan sosial akan selalu dihadapi pengelola kota yang dapat meluas, dan biasanya hanyalah soal waktu untuk muncul. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Hendra (2016) bahwa penanganan sampah yang tidak komprehensif akan memicu masalah-masalah sosial, seperti amuk masa, bentrok antarwarga, pemblokiran Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dan lain-lain.

Masih menurut Damanhuri & Padmi (2019) bahwa pengelolaan sampah pada masyarakat modern bertambah lama bertambah kompleks sejalan dengan kekomplekkan masyarakat itu sendiri. Pengelolaan sampah pada masyarakat yang hidup di lingkungan perkotaan (urban) membutuhkan keterlibatan beragam teknologi dan beragam disiplin ilmu. Beragam pertimbangan perlu dimasukkan, seperti aspek administrative, finansial, legal, perencanaan, dan perekayasaan. Dhokikhah, *et al.*, (2015) juga menyatakan bahwa implementasi 3R membutuhkan partisipasi masyarakat, kerja sama antara pemerintah,

masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah (LSM), dan di antara anggota masyarakat.

Sampah dari sumber (masyarakat maupun dunia usaha) yang tidak terpilah karena adanya ketidakmampuan melakukan sendiri pemilahan sampah, dapat melakukan kerjasama dengan hanggar terdekat. Hanggar menerima sampah dari penghasil sampah untuk dikelola. Sampah dari penghasil dikumpulkan di titik kumpul yang telah disepakati kemudian baru dilakukan pengangkutan sampah tersebut ke hanggar.

Petugas hanggar melakukan pemilahan sampah dari penghasil/nasabah sampah menjadi beberapa pemilahan yang ditentukan oleh manajemen hanggar tersebut. Pemilahan sampah dibedakan menjadi sampah organik (dilakukan daur ulang untuk dibuat kompos atau pakan magot), sampah yang dapat dijual (sampah yang diterima oleh pengusaha rongsok seperti plastik, logam, kulit dan lain sebagainya, serta yang terakhir adalah sampah residu (tidak laku dijual dan tidak bisa dikomposkan). Sampah yang di buang di TPA hanyalah sampah residu saja, sampah yang tidak bernilai jual dan tidak bisa dilakukan pengomposan.

Pengelola hanggar memperoleh pemasukan dari 3 kegiatan utama yaitu : penjualan sampah ke pengusaha rongsok, penjualan pupuk kompos dan iuran dari nasabah sampah yang menjadi pelanggannya. Pengeluaran rutin hanggar selain gaji karyawan, pengadaan dan perbaikan prasarana dan sarana juga pengeluaran dalam hal pembuangan sampah residu ke TPA. Retribusi yang dikenakan kepada pembuang sampah di TPA cukup besar yaitu 150.000 rupiah per truknya. Biaa ini ditarik oleh pengelola TPA. Jumlah retribusi yang cukup besar dikeluhkan oleh pengurus hanggar. Biaya retribusi pembuangan sampah residu yang besar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas mengharapkan pemilahan di hanggar akan berjalan efektif dan hanggar berusaha membuang sampah residu seminimal mungkin.

Berdasar informasi dari pegawai bidang kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, diperoleh informasi bahwa pengurus hanggar untuk pertama kalinya dipilih oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Hal ini sebagai langkah awal pembentukan embrio dari KSM yang nantinya akan diteruskan oleh KSM bersama desa setempat untuk kepengurusannya dan semua hal yang berkaitan dengan KSM maupun hanggar.

Berdasar Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, pengurus hanggar mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan pengelolaan KSM TPST 3R Pola Hanggar.
- b. Menyiapkan rancangan pembentukan KSM TPST 3R yang berbadan Hukum dan Mandiri.
- c. Menyusun rancangan ADRT KSM TPST 3R yang berbadan Hukum dan Mandiri.
- d. Menyusun rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan KSM TPST 3R Pola Hanggar.
- e. Melaksanakan pemetaan dan pendataan calon pelanggan pelayanan sampah.
- f. Melaksanakan pelayanan pengambilan sampah langsung dari pelanggan.
- g. Menarik restribusi/iuran sampah dari pelanggan sesuai kesepakatan bersama.
- h. Melaksanakan pemilahan sampah.
- i. Melaksanakan pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos.
- j. Melaksanakan daur ulang dan atau menjual hasil pilahan sampah an organik.
- k. Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah pengurus harus berkoordinasi dengan Unit Kebersihan dan Pertamanan/ UKP dan desa/ kelurahan setempat.
- l. Merawat dan menjaga inventaris / asset hanggar milik Pemerintah Kabupaten Banyumas
- m. Melaporkan hasil pengelolaan TPST 3R Pola Hanggar kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.

Pengurus hanggar dalam melaksanakan tugasnya wajib menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) hanggar sesuai

tugas yang tercantum dalam surat keputusan. Peneliti berencana menanyakan SOP pengelolaan masing-masing hanggar pada masing-masing ketua hanggar, ternyata SOP yang dimiliki oleh masing-masing hanggar semua sama. Hal ini menurut informasi dari salah satu ketua hanggar (Sumbang) SOP tersebut dibuat bersama antara 5 ketua hanggar bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas sebagai fasilitator, dalam suatu musyawarah bersama.

Terdapat beberapa SOP untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan hanggar. SOP tersebut wajib diketahui dan diterapkan oleh pengurus hanggar maupun pihak lain yang terkait seperti bos rongsok, tenaga pengumpul sampah desa dan yang lainnya. SOP tersebut antara lain sebagai berikut :

1. SOP Penjaringan Pelanggan
 - a. Persiapan maring (data penduduk, data wilayah sasaran)
 - b. Petugas penjaring mendatangi kantor desa
 - c. Petugas melapor ke pengurus untuk penjadwalan pengangkutan sampah pelanggan baru dan memberikan jadwal baru kepada petugas angkut.
 - d. Proses Selesai
2. SOP Pengambilan Sampah Pelanggan
 - a. Jadwal kerja.
 - b. Menyiapkan peralatan kerja.
 - c. Berangkat ke lokasi (pelanggan).
 - d. Mengambil sampah di tiap pelanggan sesuai jadwal.
 - e. Mengangkut sampah ke hanggar.
 - f. Membersihkan peralatan kerja dan mencuci alat angkut (gerobag, kendaraan roda tiga, truk).
 - g. Proses selesai.
3. SOP Pemilahan
 - a. Sampah dibongkar oleh petugas angkut kemudian dipilah oleh tenaga pemilah.
 - b. Residu hasil pemilahan di kirim ke TPA.
 - c. Proses pembuatan pupuk organik di rumah kompos.
 - d. Proses pemilahan sampah non organik, dipilah menurut jenisnya.

- e. Packing hasil pilahan yang siap jual dan simpan di gudang.
 - f. Proses selesai.
4. SOP Penarikan Iuran
 - a. Petugas penarik mendatangi koordinator wilayah/instansi pada akhir bulan.
 - b. Petugas menyerahkan *invoice* kepada pelanggan.
 - c. Koordinator membayar iuran sesuai jumlah tagihan dan menerima kuitansi pembayaran.
 - d. Petugas penarik merekap perolehan hasil tarikan.
 - e. Petugas penarik menyerahkan uang ke bendahara.
 - f. Pemungutan selesai.
 5. SOP Penjualan Rongsok
 - a. Pengurus memeriksa rongsok yang sudah dipacking.
 - b. Menimbang rongsok yang sudah dipacking.
 - c. Menghubungi pengepul untuk mencari harga tertinggi.
 - d. Jual ke pengepul dengan harga tertinggi.
 - e. Bendahara menyimpan uang hasil penjualan di bank.
 - f. Proses selesai.
 6. SOP Penyetoran dari Bendahara ke Bank
 - a. Persiapan tahapan penyetoran uang iuran warga ke bank.
 - b. Bendahara menyiapkan uang, dan melaporkan rekap penerimaan dan slip setoran kepada koordinator.
 - c. Bendahara menyetor uang ke bank.
 - d. Proses selesai

Awal hanggar beroperasi selain bangunan, prasarana dan sarana, upah pengelola hanggar pun juga ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas lewat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Lama Pemerintah Kabupaten Banyumas menanggung upah karyawan hanggar selama 3 bulan di awal hanggar

beroperasi. Upah karyawan selanjutnya menjadi tanggung jawab masing-masing hanggar tergantung dari kemampuan masing-masing hanggar dalam memberikan upah kepada karyawannya. Pada saat peneliti melakukan penelitian, upah karyawan hanggar sudah tidak ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas, hanggar sudah mandiri dalam membayar upah karyawan dari uang pemasukan hanggar.

Pemerintah Kabupaten Banyumas sampai saat penelitian dilakukan masih memberikan beberapa subsidi kepada hanggar. Subsidi yang diberikan antara lain berupa pengangkutan sampah residu ke TPA sebanyak 2 (dua) kali pengangkutan setiap harinya. Truk, biaya BBM dan sopir menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk maksimal 2 kali angkut. Pengangkutan lebih dari 2 (dua) kali angkut menjadi tanggung jawab masing-masing hanggar. Biaya buang sampah di TPA sebesar 150.000 rupiah per sekali buang menjadi tanggung jawab masing-masing hanggar.

Simpulan

Pemerintah Kabupaten Banyumas mendirikan 5 hanggar untuk melakukan pengelolaan terhadap timbulan sampah masyarakat. Kegiatan hanggar secara garis besar meliputi kegiatan : jemput sampah dari pelanggan, pemilahan sampah, pengomposan, dan pembuangan sampah residu ke TPA. Keempat hanggar beroperasi sesuai tujuan didirikannya hanggar, terdapat satu hanggar yang tidak beroperasi seperti harapan yaitu hanggar Kedungrandu. Target Jakstrada Kabupaten Banyumas yaitu, melakukan pengurangan sampah sebesar 30% sampai tahun 2025. Jika melihat timbulan sampah hanya dari jumlah sampah yang masuk ke hanggar, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas telah melakukan pengurangan sampahnya sebesar 18,33%.

Daftar Pustaka

- Badan Standarisasi Nasional (BSN). (1991). Standar Nasional Indonesia (SNI) S-04-1991-03 tentang Spesifikasi Timbulan Sampah untuk Kota Kecil dan Kota Sedang di Indonesia. Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.
- Badan Standarisasi Nasional (BSN). (1992). Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-2454-1992 tentang Tata Cara Pengelolaan Teknik Sampah Perkotaan. Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.
- Badan Standarisasi Nasional (BSN). (1994). Standar Nasional Indonesia (SNI). 1994, SIN 03-3241-1994, tentang Tata Cara Pemulihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah. Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.
- Badan Standarisasi Nasional (BSN). (1994). Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-3964-1994 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan. Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.
- Bungin, B. (2003). Analisis Data Penelitian Kualitatif : Pengantardan Penjelasan. Cetakan Pertama. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Damanhuri, E., Padmi, T. (2019). Pengelolaan Sampah Terpadu. Edisi Kedua. ITB Press, Bandung.
- Das S., et al. (2019). Solid waste management: Scope and the challenge of sustainability, *Journal of Cleaner Production*.
- Departemen Pekerjaan Umum. (2006). Permen PU nomor : 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP). Jakarta.
- Dhokhikah Y., et al. (2015). Community participation in household solid waste reduction in Surabaya, Indonesia. *Resources, Conservation and Recycling Journal*.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. (2016). Laporan Periodik Sampah Harian Kabupaten Banyumas Tahun 2016.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. (2017). Laporan Periodik Sampah Harian Kabupaten Banyumas Tahun 2017.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. (2018). Laporan Periodik Sampah Harian Kabupaten Banyumas Tahun 2018.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. (2019). Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019.
- Direktorat Bina Program, Diirjen. Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum. (1992/1993). Penyusunan Pedoman Teknis Operasi dan Pemeliharaan Pembangunan Prasarana Perkotaan (Komponen Persampahan).
- Ibrahim. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Pertama. CV. Alfabeta, Bandung.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2017). Petunjuk Teknis Tempat Pengolahan Sampah 3R. Jakarta.
- Kristanto, P. (2004). Ekologi Industri. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas. (2018). Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Republik Indonesia. (2006), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KNSP-SPP).
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Pengelolaan Sampah. 7 Mei.

- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3 Oktober.
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Menteri Dalam Negeri : Pedoman Pengelolaan Sampah.
- Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 15 Oktober.
- Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Republik Indonesia. (2017). Peraturan Presiden Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 15 Oktober.
- Silalahi, M.D. (2001). Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Edisi Ketiga. PT. Alumni, Bandung.
- Singarimbun, M., Effendi, S. (1995). Metode Penelitian Survei. Edisi Kedua. PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Soemarwoto, O. (2001). Atur-Diri-Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sudibyo, H., et al. (2017). Municipal Solid Waste Management in Indonesia - A Study about Selection of Proper Solid Waste Reduction Method in D.I. Yogyakarta Province. *World Engineers Summit – Applied Energy Symposium & Forum: Low Carbon Cities & Urban Energy Joint Conference*. WES-CUE 2017, 19–21 July 2017, Singapore.
- Sudibyo, H., et al. (2017). Technological Evaluation of Municipal Solid Waste Management Sistem in Indonesia. *The 8th International Conference on Applied Energy – ICAE2016*.
- Sugiyono (2018). Metode Penelitian Evaluasi. Edisi Pertama. CV. Alfabeta, Bandung.
- Suliastini, L.P.L., dkk. (2013). Potensi dan Kajian Timbulan Sampah Pemukiman di Kawasan Kota Banjarbaru (studi Kasus Kelurahan Guntung Manggis). *EnviroScientiae* 9, (2013) 81-84, ISSN 1978-8096.
- Tchobanoglous, G., Teisen H., Eliassen, R. (1993). *Integrated Solid Waste Manajemen*. Mc.Graw Hill : Kogakusha, Ltd.
- Trijono, R. (2015). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Edisi Pertama. Penerbit Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- Zurbrügg, C., et al. (2012). Determinants of sustainability in solid waste management – The Gianyar Waste Recovery Project in Indonesia. *Waste Management Journal*.
- <https://kbbi.web.id/dinamika> diakses pada hari minggu tanggal 26 Januari 2020 jam 19.29 WIB.
- <https://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-dinamika-menurut-para-ahli/>, diakses pada hari minggu tanggal 26 Januari 2020 jam 19.45 WIB.